



Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Kritis Mahasiswa dalam Menyikapi Informasi Politik di Media Sosial: Studi Literatur

Assyifa Zalfa Azzahra¹, Muhammad Naufal Dhanantoro², Alya Agustina Salam³, Fadghom Gitrif Al Labib⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah

Correspondence: assyifaazzahra50@students.unnes.ac.id

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received May 13th, 2026 Revised Jun 11th, 2026 Accepted Jun 19th, 2026 Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan, berpikir kritis, literasi digital, media sosial	Penyebaran informasi politik yang masif dan tidak terfilter di media sosial menjadi tantangan serius bagi mahasiswa yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Rendahnya kapasitas berpikir kritis mahasiswa dalam menyikapi informasi tersebut berpotensi memicu polarisasi sosial dan penyebaran disinformasi yang merugikan kehidupan berbangsa. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap kritis mahasiswa terhadap informasi politik di media sosial serta mensintesis temuan-temuan literatur mengenai kontribusinya dalam meningkatkan kapasitas literasi digital mahasiswa. Metode yang digunakan adalah studi literatur <i>narrative review</i> dengan penelusuran pada basis data <i>Google Scholar</i>, dengan kriteria inklusi artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2023-2025. Hasil kajian mengungkap empat temuan utama, yakni PKn berperan sebagai fondasi etika digital melalui internalisasi nilai Pancasila dan demokrasi, menumbuhkan sikap kritis konstruktif terhadap informasi politik, menjadi instrumen utama dalam menangkal hoaks dan disinformasi, serta mengungkap kesenjangan antara pengetahuan normatif mahasiswa dengan praktik etika digital sehari-hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonseptualisasi pembelajaran PKn yang lebih inovatif, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika digital merupakan kebutuhan mendesak dalam pendidikan tinggi Indonesia. Ke depan, diperlukan inovasi kurikulum berbasis literasi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan agar PKn mampu mencetak warga negara digital yang kritis, beretika, dan bertanggung jawab.
Article Info	ABSTRACT
Article history: Received May 13th, 2026 Revised Jun 11th, 2026 Accepted Jun 19th, 2026 Keyword: <i>civic education, critical thinking, digital literacy, social media.</i>	<i>The massive and unfiltered spread of political information on social media poses a serious challenge for students who lack adequate digital literacy capacity. This study aims to examine the role of Civic Education (PKn) in shaping students' critical attitudes toward political information on social media, as well as to synthesize literary findings regarding its contribution to enhancing students' digital literacy capacity. This study employs a narrative review design using the Google Scholar database, with thematic analysis conducted on 14 reputable articles published between 2023 and 2025. The study reveals four key findings: Civic Education serves as the foundation of digital ethics through the internalization of Pancasila values and democracy; fosters constructive critical attitudes toward political information in digital spaces; functions as a primary instrument in countering hoaxes and disinformation; and identifies a gap between students' normative knowledge of digital ethics and their actual daily media practices. This study concludes that a reconceptualization of Civic Education learning that is more innovative, contextual, and adaptive to digital dynamics is an urgent need in Indonesian higher education. Moving forward, a digital literacy-based curriculum innovation integrated with national values is required so that Civic Education (PKn) can produce critical, ethical, and responsible digital citizens.</i>

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah mengubah lanskap informasi secara fundamental, khususnya dalam cara individu mengakses, memproduksi, dan mendistribusikan pengetahuan di ruang publik (Fatimah, 2025). Perubahan ini telah membawa implikasi luas bagi dinamika komunikasi sosial, politik, dan pendidikan di seluruh dunia. Platform berbasis internet seperti *WhatsApp*, *Instagram*, dan *TikTok* mendorong sirkulasi informasi bergerak melampaui batas geografis dan temporal yang selama ini menjadi hambatan komunikasi konvensional. Kecepatan dan jangkauan distribusi informasi ini menciptakan ekosistem digital yang sekaligus menawarkan peluang dan ancaman bagi kualitas diskursus publik (Wardle, 2017)

Teknologi digital pada abad ke-21 tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga mentransformasi cara mereka berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan (Afriadi & Fitri, 2024). Mahasiswa menempati posisi strategis sekaligus rentan sebagai kelompok yang paling intens terpapar beragam konten digital, termasuk informasi-informasi politik yang terus tumbuh dan berkembang dalam ranah media sosial. Intensitas paparan tersebut tidak hanya membentuk cara berpikir mahasiswa, melainkan juga turut mengonstruksi sikap dan respons mereka terhadap realitas sosial-politik yang terus berubah.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang fungsi strategis yang melampaui sekadar transmisi nilai-nilai normatif kebangsaan. Winataputra (2016) menegaskan bahwa PKn dirancang sebagai instrumen pedagogis yang membangun pola pikir kritis, analitis, dan bertanggung jawab pada mahasiswa, pandangan ini diperkuat oleh Kerr (1999) yang menyatakan bahwa PKn berfungsi membentuk warga negara yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berpartisipasi aktif dan bernalar kritis. Najicha & Kurniawati (2023) menegaskan bahwa penguatan kesadaran kewarganegaraan di lingkungan akademik merupakan urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat dan berintegritas. Hal ini mengisyaratkan bahwa tuntutan terhadap mahasiswa bukan sekadar memahami hak dan kewajiban konstitusional, melainkan juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merespons berbagai informasi secara rasional.

Literasi digital merupakan kecakapan yang semakin krusial dalam era informasi, yakni kemampuan mengakses, menilai, dan menciptakan konten digital secara kritis dan etis (Cynthia & Sihotang, 2023). Pendidikan kewarganegaraan memiliki kapasitas strategis untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kerangka nilai kewarganegaraan, sehingga mahasiswa tidak sekadar terampil secara teknis, melainkan juga sadar akan implikasi sosial, politik, dan etis dari setiap tindakan digital mereka. Japar et al. (2024) menunjukkan bahwa PKn memungkinkan generasi muda mengakses sumber pengetahuan yang lebih beragam sekaligus mendorong mereka bersikap lebih kritis dan terbuka terhadap perbedaan perspektif. PKn dengan demikian menjadi instrumen efektif untuk menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan dinamika global, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan mereka (Tarigan et al., 2025).

Perkembangan arus informasi di media sosial tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas konten yang beredar. Alhudawi & Sitepu (2025) mengingatkan bahwa era digital membawa konsekuensi serius berupa banjir informasi yang tidak sepenuhnya terseleksi dengan baik. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa disinformasi merupakan informasi keliru yang sengaja dibuat dan disebarluaskan dengan tujuan menyesatkan, memanipulasi, atau menggiring opini masyarakat terhadap suatu isu tertentu (Nisa, 2024). Sepanjang tahun 2023, Mafindo mencatat sebanyak 1.292 hoaks politik yang beredar di ruang

digital Indonesia, dengan 645 di antaranya berkaitan langsung dengan dinamika Pemilu 2024, angka yang dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode Pemilu 2019 (Mafindo, 2024).

Gap inilah yang menjadi inti permasalahan, yakni mahasiswa sebagai kelompok usia produktif dengan intensitas penggunaan media sosial tertinggi justru paling rentan terhadap paparan dan penyebaran disinformasi politik. Penelitian Fanshoby dan Prasetyawan (2021) menunjukkan bahwa tingginya penggunaan media sosial berkorelasi dengan rendahnya kemampuan mahasiswa dalam mengenali hoaks akibat obesitas informasi digital, sementara riset Nurmansyah et al. (2026) mengungkapkan bahwa keterlibatan mahasiswa di platform digital belum secara otomatis diikuti oleh kemampuan berpikir kritis yang memadai. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian sistematis tentang peran PKn sebagai instrumen pendidikan yang mampu menutup kesenjangan antara tingginya akses informasi digital dengan rendahnya kapasitas evaluasi kritis mahasiswa (Vosoughi et al., 2018).

Kesenjangan antara tingginya akses terhadap informasi dan rendahnya kapasitas literasi digital sebagian mahasiswa masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Harahap et al. (2023) mengungkapkan bahwa mahasiswa belum mampu mengelola informasi yang bersifat kontroversial secara bijaksana dan konstruktif. Keterlibatan mahasiswa di media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, termasuk kemampuan mengenali bias dan mengevaluasi bukti. Akan tetapi, mekanisme spesifik bagaimana media sosial membentuk sikap kritis mahasiswa masih memerlukan kajian lebih mendalam (Hasan, 2024). Kesenjangan inilah yang menjadi landasan urgensi penelitian ini, yakni perlunya penguatan sistematis peran PKn sebagai instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi informasi politik.

Artikel ini bertujuan mengkaji peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap kritis mahasiswa terhadap informasi politik di media sosial, sekaligus mensintesis temuan-temuan literatur mengenai bagaimana nilai-nilai yang diinternalisasi melalui pembelajaran PKn mampu membentengi mahasiswa dari pengaruh negatif disinformasi politik yang semakin marak. Kajian ini berupaya menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu (1) bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap kritis mahasiswa terhadap informasi politik di media sosial, dan (2) sejauh mana PKn berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas literasi digital mahasiswa. Dengan menjawab kedua pertanyaan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pembelajaran PKn yang lebih adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan era digital.

METDE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur naratif (*narrative review*). Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat analitis-interpretatif, yakni mengkaji dan mensintesis berbagai temuan penelitian terdahulu secara tematik mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk sikap kritis mahasiswa terhadap informasi politik di media sosial. Greenhalgh et al. (2018) menegaskan bahwa *narrative review* bersifat interpretatif dan bertujuan mengembangkan konsep, teori, atau pemahaman yang lebih kontekstual terhadap suatu fenomena.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus kajian. Penelusuran literatur dilaksanakan melalui basis data akademik *Google Scholar*. Kata kunci yang digunakan meliputi: "Pendidikan

Kewarganegaraan", "sikap kritis mahasiswa", "literasi digital", "informasi politik", "media sosial", serta padanan dalam bahasa Inggris: "civic education", "critical thinking", "digital literacy", dan "political information". Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap dengan kriteria yang terukur. Kriteria inklusi meliputi empat hal. Pertama, artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019–2025, kecuali referensi teori dasar yang memiliki relevansi metodologis tinggi meskipun diterbitkan sebelum rentang waktu tersebut. Kedua, artikel yang memuat topik yang berkaitan langsung dengan PKn, sikap kritis, literasi digital, atau informasi politik di media sosial. Ketiga, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi dengan proses penelaahan sejawat. Keempat, artikel yang tersedia secara daring dalam format lengkap.

Prosedur Penelusuran dan Seleksi Literatur

Penelusuran melalui basis data *Google Scholar* menghasilkan 25 artikel ilmiah pada tahap identifikasi awal. Setelah melalui proses penyaringan berdasarkan relevansi topik, kemutakhiran tahun publikasi, serta ketersediaan teks lengkap, diperoleh 14 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan menjadi sumber analisis utama dalam kajian ini berasal dari periode 2023–2025. Sebanyak 11 artikel dieksklusi karena tidak relevan dengan fokus kajian, tidak tersedia dalam bentuk teks lengkap, atau tidak melewati proses penelaahan sejawat.

Teknik Analisis Data

Seluruh literatur yang memenuhi kriteria inklusi dikompilasi dan diekstraksi datanya secara sistematis, mencakup nama penulis, tahun publikasi, judul, nama jurnal, metode, fokus kajian, dan temuan pokok, yang kemudian diorganisasikan ke dalam matriks literatur untuk memudahkan perbandingan antarsumber. Penilaian kualitas studi dilakukan dengan mempertimbangkan desain penelitian dan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik yang mencakup empat tahapan. Pertama, pembacaan menyeluruh terhadap seluruh literatur yang terkumpul. Kedua, pelabelan bagian-bagian teks yang mengandung makna relevan dengan fokus kajian. Ketiga, pengelompokan kode ke dalam kategori-kategori berdasarkan kesamaan tema dan substansi. Keempat, penafsiran dan pengintegrasian temuan dari berbagai studi untuk membangun pemahaman yang utuh. Keseluruhan proses ini diarahkan untuk memetakan yang berkaitan dengan topik kajian, kemudian dipadukan melalui pendekatan meta-narasi guna menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Ringkasan Artikel yang Dianalisis dalam Kajian Literatur

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Jurnal Asal	Metode	Fokus Kajian	Temuan Pokok
1	Supandria et al. (2025)	Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Etika Digital dan Kesadaran Sosial Mahasiswa di	<i>Academy of Social Science and Global Citizenship Journal</i>	Studi Literatur	PKn, etika digital, kesadaran sosial mahasiswa	PKn memperkuat etika digital melalui nilai Pancasila dan demokrasi

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Jurnal Asal	Metode	Fokus Kajian	Temuan Pokok
Era Media Sosial						
2	Tarigan et al. (2025)	Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa di Era Digital	Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan	Studi Literatur	PKn, nilai kebangsaan, Generasi Z, era digital	PKn strategis membentuk identitas nasional Generasi Z di tengah digitalisasi
3	Harahap et al. (2023)	Menanamkan Kritisisme Konstruktif di Perguruan Tinggi: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengelola Tren Kontroversial Mahasiswa	Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran	Kualitatif	Kritisisme konstruktif, PKn, tren kontroversial mahasiswa	PKn menumbuhkan kritisisme konstruktif dalam mengelola konten kontroversial
4	Japar et al. (2024)	<i>Students' Perspectives on Civic Education through Digital Citizenship in The Virtual Era</i>	<i>European Journal of Educational Research</i>	Survei	PKn digital, kewarganegaraan digital, perspektif mahasiswa	Media digital memperluas perspektif mahasiswa jika dibekali kemampuan analisis memadai
5	Kale et al. (2025)	Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital	Jurnal Media Sains	Studi Literatur	PKn, karakter bangsa, era digital	PKn menumbuhkan literasi digital dan kesadaran kritis terhadap isu demokrasi dan HAM
6	Lazuardy et al. (2025)	Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Menghadapi Tantangan Era Digital	PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta	Studi Literatur	Inovasi pembelajaran PPKn, era digital, berpikir kritis	Inovasi pembelajaran PPKn meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi demokrasi digital

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Jurnal Asal	Metode	Fokus Kajian	Temuan Pokok
7	Afriadi & Fitri (2024)	<i>The Role of Citizenship Education in Shaping Awareness of Democracy and Political Participation in the Digital Era</i>	<i>International Journal of Business, Law, and Education</i>	Studi Literatur	PKn, kesadaran demokrasi, partisipasi politik era digital	PKn membentuk kesadaran demokrasi dan mendorong partisipasi politik mahasiswa
8	Alhudawi & Sitepu (2025)	Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Etika Digital Siswa	Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan	Studi Literatur	PKn, etika digital siswa, era media sosial	PKn menguatkan etika digital dalam menghadapi banjir informasi di media sosial
9	Hasan (2024)	Analisis Peran Media Sosial dalam Membentuk Sikap Kritis Mahasiswa terhadap Isu Kewarganegaraan	Media Manajemen Pendidikan	Studi Kasus	Media sosial, sikap kritis, isu kewarganegaraan	Media sosial meningkatkan keterlibatan politik; mekanisme sikap kritis perlu dikaji lebih dalam
10	Rohmatu et al. (2025)	Eksplorasi Nilai-Nilai Etika Digital Berbasis Kearifan Lokal sebagai Fondasi Pengembangan Kecerdasan Buatan Etis di Sekolah	Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan	Studi Literatur	Etika digital, kearifan lokal, nilai Pancasila	Nilai Pancasila berbasis kearifan lokal membentuk etika digital yang relevan secara kultural
11	Mubaraq & Faslah (2025)	Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengembang Pemikiran Politik Mahasiswa	Maliki Interdisciplinary Journal	Studi Literatur	PKn, pemikiran politik mahasiswa, partisipasi aktif	Semakin tinggi kemampuan berpikir kritis mahasiswa, semakin aktif keterlibatan sosial-politiknya
12	Nisa (2024)	Peran Literasi di Era Digital dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial	Journal of Education	Studi Literatur	Literasi digital, hoaks, disinformasi, media sosial	Literasi digital menjadi instrumen utama menghadapi hoaks dan disinformasi

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Jurnal Asal	Metode	Fokus Kajian	Temuan Pokok
13	Najicha & Kurniawati (2023)	Pentingnya Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan pada Mahasiswa di Lingkungan Kampus	Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan	Studi Literatur	Kesadaran kewarganegaraan, lingkungan kampus, pendidikan tinggi	Penguatan kesadaran kewarganegaraan di kampus urgensi membangun ekosistem pendidikan berintegritas
14	Zuhriyah & Basith (2023)	Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Moral Mahasiswa di Era Modern	<i>Journal of Innovative and Creativity</i>	Studi Kepustakaan/ Deskriptif Kualitatif	Hakikat PKn, karakter moral mahasiswa, era modern	PKn berperan penting membentuk karakter moral mahasiswa melalui nilai moral dan nasionalisme

Berdasarkan proses analisis tematik terhadap 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, kajian ini menghasilkan temuan yang menjawab kedua pertanyaan penelitian yang diajukan. Menjawab RQ 1, literatur secara konsisten menunjukkan bahwa PKn berperan strategis dalam membentuk sikap kritis mahasiswa melalui dua mekanisme utama: pertama, sebagai fondasi etika digital yang menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM; kedua, sebagai instrumen pembentukan kemampuan berpikir kritis konstruktif dalam merespons informasi politik di media sosial. Menjawab RQ 2, kajian literatur mengungkap bahwa PKn berkontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas literasi digital mahasiswa, meskipun ditemukan kesenjangan signifikan antara pengetahuan normatif yang diperoleh di kelas dengan penerapannya dalam praktik bermedia sehari-hari. Ketiga tema yang muncul dari analisis ini, yakni PKn sebagai fondasi etika digital, peran PKn dalam pembentukan sikap kritis, serta kesenjangan implementasi, ketiganya tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan analitis yang saling menopang dalam menggambarkan kompleksitas peran PKn di tengah informasi digital yang terus berkembang.

Tabel 2 Ringkasan Tema Utama Hasil Kajian Literatur

No.	Tema Utama	Substansi Temuan	Sumber Referensi
1	PKn sebagai Fondasi Etika Digital	PKn menanamkan nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai landasan moral bermedia sosial sehingga mahasiswa tidak sekadar terampil secara teknis, melainkan juga sadar akan implikasi etis setiap tindakan digitalnya	Supandria et al. (2025); Tarigan et al. (2025); Kale et al. (2025); Rohmatu et al. (2025); Alhudawi & Sitepu (2025)
2	PKn dan Pembentukan Sikap Kritis terhadap Informasi Politik	PKn berperan menumbuhkan kritisisme konstruktif mahasiswa dalam merespons informasi politik yang kontroversial di ruang digital melalui kerangka analitis yang memisahkan	Harahap et al. (2023); Supandria et al. (2025); Japar et al. (2024); Mubaraq & Faslah (2025); Hasan

		fakta dari opini dan mengevaluasi kredibilitas sumber	(2024); Zuhriyah & Basith (2023)
3	Literasi Digital sebagai Instrumen Menghadapi Disinformasi	Literasi digital yang dikembangkan melalui PKn menjadi instrumen utama mahasiswa dalam mengenali, memverifikasi, dan menangkal hoaks serta disinformasi yang beredar di media sosial	Nisa (2024); Kale et al. (2025); Alhudawi & Sitepu (2025); Afriadi & Fitri (2024)
4.	Kesenjangan Implementasi dan Urgensi Rekoneptualisasi	Terdapat gap signifikan antara pengetahuan normatif mahasiswa tentang etika digital yang diperoleh melalui PKn dengan penerapannya dalam praktik bermedia sehari-hari, yang menuntut rekoneptualisasi pembelajaran PKn yang lebih kontekstual dan adaptif	Supandria et al. (2025); Tarigan et al. (2025); Hasan (2024); Lazuardy et al. (2025); Najicha & Kurniawati (2023); Afriadi & Fitri (2024)

Sintesis terhadap 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi mengungkap empat temuan yang saling berkaitan, mencakup peran PKn sebagai fondasi etika digital, pembentukan sikap kritis, penguatan literasi digital, serta kesenjangan implementasi yang menuntut rekoneptualisasi pembelajaran. Temuan pertama mengidentifikasi PKn sebagai fondasi etika digital mahasiswa, yakni nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM yang ditransmisikan melalui pembelajaran PKn berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing mahasiswa dalam berinteraksi dan mengonsumsi informasi di ruang media sosial. PKn dengan demikian tidak sekadar berfungsi sebagai mata kuliah normatif, tetapi berperan sebagai pembentuk karakter digital yang relevan dengan tantangan zaman. Temuan kedua mengungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kualitas pembelajaran PKn dengan kapasitas mahasiswa dalam bersikap kritis terhadap informasi politik. Mahasiswa yang mendapatkan pengalaman belajar PKn yang berkualitas cenderung lebih mampu memverifikasi informasi, mengenali narasi manipulatif, serta merespons isu-isu politik secara konstruktif dan proporsional. Temuan ketiga menunjukkan bahwa literasi digital yang dikembangkan melalui PKn berperan sebagai instrumen utama mahasiswa dalam mengenali, memverifikasi, dan menangkal hoaks serta disinformasi yang beredar di media sosial, sekaligus membekali mahasiswa dengan kesadaran kritis terhadap implikasi sosial dan etis dari setiap tindakan digital mereka. Temuan keempat mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi yang menjadi tantangan struktural, yakni meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan normatif yang memadai mengenai etika bermedia dan nilai-nilai demokrasi, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku digital sehari-hari, sehingga menuntut transformasi pendekatan pembelajaran PKn yang lebih kontekstual, partisipatif, dan responsif terhadap realitas digital.

Pembahasan

PKn sebagai Fondasi Etika Digital Mahasiswa

PKn sebagai fondasi etika digital menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan merupakan prasyarat bagi terbentuknya perilaku digital mahasiswa yang etis dan bertanggung jawab. Supandria et al. (2025) menegaskan bahwa PKn berperan krusial melalui pengintegrasian nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia ke dalam

kurikulum literasi digital. Penguatan tersebut tidak sekadar meningkatkan kapasitas teknis mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi secara aman dan produktif, melainkan juga menumbuhkan tanggung jawab sosial dan *netiket* sebagai fondasi bagi terciptanya ruang digital yang konstruktif dan beradab. PKn dengan demikian tidak dapat lagi diperlakukan sebagai mata kuliah normatif yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai instrumen strategis yang menjangkau dimensi perilaku mahasiswa di ruang publik digital (Westheimer & Kahne, 2004). Realitas bahwa ruang digital kini telah menjelma menjadi ruang utama di mana nilai-nilai kebangsaan diuji dan diperdebatkan yang semakin memperkuat urgensi tersebut. Fondasi etis yang lemah menjadikan mahasiswa rentan terhadap arus disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang marak di media sosial, sehingga internalisasi nilai-nilai PKn tidak cukup berhenti pada tataran kognitif, melainkan harus mampu membentuk disposisi moral yang reflektif dan adaptif terhadap dinamika ruang digital (Supandria et al., 2025; Kale et al., 2025).

Implikasi dari temuan pertama ini diperluas oleh Tarigan et al. (2025) yang menyoroti bahwa di tengah arus digitalisasi yang kian mengikis nilai-nilai kebangsaan, PKn hadir sebagai jalur pendidikan paling strategis dalam membekali generasi muda dengan identitas nasional yang kokoh. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa generasi Z mencapai 27,94% dari total penduduk Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan generasi Z diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemajuan bangsa, sehingga penanaman nilai kebangsaan melalui pendidikan PKn semakin penting. PKn bukan sekadar wahana transmisi pengetahuan kewarganegaraan, melainkan ruang pembentukan karakter yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap perilaku bermedia mahasiswa. Penguatan PKn sebagai fondasi etika digital karenanya merupakan keniscayaan dalam menjaga kualitas demokrasi di era informasi (Afriadi & Fitri, 2024; Rohmatu et al., 2025).

Penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum PKn menunjukkan potensi yang kuat dalam membentuk etika digital yang berlandaskan kearifan lokal sesuai kondisi budaya masyarakat Indonesia (Rohmatu et al., 2025). Ancaman disinformasi politik di media sosial tidak dapat diatasi semata melalui pendekatan teknis, tetapi diperlukan fondasi nilai yang kokoh agar mahasiswa mampu menilai informasi bukan hanya dari sudut pandang faktual, tetapi juga dari perspektif etika, keadilan sosial, dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa. Nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung imperatif moral untuk menghormati martabat sesama pengguna media sosial dalam konteks penyebaran dan konsumsi informasi politik. Ketika nilai-nilai ini diinternalisasikan secara mendalam melalui pembelajaran PKn yang bermakna, mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan tentang etika digital, tetapi juga motivasi moral yang autentik untuk mempraktikkannya (Supandria et al., 2025; Alhudawi & Sitepu, 2025).

PKn memiliki kapasitas unik untuk menghubungkan dimensi global literasi digital dengan akar budaya dan identitas nasional mahasiswa, sehingga proses internalisasi nilai tidak terasa asing melainkan relevan secara kultural dan personal. Kemampuan ini menjadi keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh mata kuliah lain dalam kurikulum pendidikan tinggi Indonesia (Rohmatu et al., 2025; Tarigan et al., 2025). Kale et al. (2025) menegaskan bahwa literasi digital yang dikembangkan melalui PKn secara efektif menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu-isu demokrasi, HAM, dan dinamika global, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan mereka secara berkelanjutan. PKn dengan demikian tidak hanya membentuk warga negara yang cerdas secara informasi, tetapi juga berkarakter kuat dan berkomitmen teguh terhadap nilai-nilai demokrasi yang bermartabat.

PKn dalam Membentuk Sikap Kritis terhadap Informasi Politik

Kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menyikapi informasi politik tidak terbentuk secara alamiah, melainkan memerlukan *scaffolding* pedagogis yang sistematis dan PKn memiliki kapasitas unik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Harahap et al. (2023) mengungkapkan bahwa penanaman kritisisme konstruktif melalui PKn di lingkungan perguruan tinggi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, terutama menghadapi kecenderungan sebagian mahasiswa yang merespons konten kontroversial secara impulsif tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Kecenderungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik ruang media sosial yang secara algoritmis dirancang untuk mendorong reaksi cepat dan emosional (Vosoughi et al., 2018), sehingga mahasiswa yang tidak memiliki bekal berpikir kritis yang memadai menjadi rentan terhadap manipulasi informasi dan polarisasi politik. PKn memainkan peran tidak tergantikan dengan membekali mahasiswa kerangka analitis untuk memisahkan fakta dari opini, mengidentifikasi bias dalam penyajian informasi, serta mengevaluasi kredibilitas sumber secara sistematis.

Supandria et al. (2025) menegaskan bahwa PKn yang dirancang secara adaptif mampu mendorong mahasiswa tidak sekadar memahami nilai-nilai demokrasi secara normatif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam bentuk sikap kritis yang nyata ketika berhadapan dengan konten politik di media sosial. Internalisasi nilai-nilai tersebut menjadi fondasi yang membedakan mahasiswa yang bersikap kritis secara konstruktif dari mereka yang merespons informasi secara reaktif dan impulsif. Kemampuan berpikir kritis yang terbentuk melalui PKn diharapkan tidak berhenti pada level reaktif, melainkan mendorong mahasiswa menghasilkan respons yang bijak, argumentatif, dan bertanggung jawab secara sosial (Mubaraq & Faslah, 2025). Perbedaan antara kritisisme yang destruktif dan kritisisme yang konstruktif inilah yang menjadi titik kunci kontribusi PKn dalam membentuk karakter intelektual mahasiswa di era digital.

Hasan (2024) melalui studi kasusnya menemukan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa di media sosial berkorelasi positif dengan peningkatan kemampuan mengenali bias dan mengevaluasi bukti, namun mekanisme spesifik bagaimana keterlibatan tersebut membentuk sikap kritis masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Temuan ini justru memperkuat urgensi peran PKn sebagai instrumen yang secara sistematis membangun kapasitas kritis mahasiswa yaitu sesuatu yang tidak dapat diperoleh secara otomatis hanya dari intensitas penggunaan media sosial semata. Mahasiswa yang terlatih berpikir kritis melalui PKn tidak hanya mampu menolak informasi yang menyesatkan, tetapi juga mampu mengomunikasikan pandangannya secara etis dan produktif di ruang publik digital, sehingga turut berkontribusi pada terciptanya diskursus demokrasi yang sehat dan berkualitas (Harahap et al., 2023; Japar et al., 2024).

Japar et al. (2024) menunjukkan bahwa platform digital menyediakan ruang yang dapat memperluas perspektif mahasiswa dan mendorong mereka bersikap lebih kritis terhadap berbagai perbedaan pandangan. Potensi tersebut hanya terealisasi secara optimal apabila mahasiswa telah dibekali kemampuan analisis yang memadai melalui pembelajaran PKn yang terstruktur dan bermakna. PKn dan media sosial karenanya dapat beroperasi secara sinergis, di mana media sosial menyediakan ruang informasi yang luas dan dinamis, sementara PKn membekali mahasiswa kompetensi untuk menavigasinya secara kritis, selektif, dan bertanggung jawab (Afriadi & Fitri, 2024; Lazuardy et al., 2025). Sinergi ini hanya berjalan efektif apabila pembelajaran PKn mampu menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan dengan realitas digital mahasiswa sehari-hari.

Zuhriyah & Basith (2023) memperkuat perspektif ini dengan menegaskan bahwa PKn harus mampu menjadi sistem moral dan etika yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh yaitu sebuah integrasi yang secara langsung menopang pembentukan sikap kritis mahasiswa. Aspek kognitif mendorong mahasiswa memahami dan menganalisis informasi secara rasional; aspek afektif membangun kepedulian dan sensitivitas terhadap dampak sosial informasi yang disebarkan; aspek psikomotorik mendorong mahasiswa bertindak secara etis dan kritis di ruang digital. Ketiga aspek ini hanya dapat berkembang secara sinergis apabila pembelajaran PKn bergerak melampaui penghafalan teori menuju model yang berbasis kasus nyata, reflektif, dan partisipatif (Zuhriyah & Basith, 2023; Lazuardy et al., 2025). Mahasiswa yang mendapatkan pengalaman belajar PKn yang holistik akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kritis tidak hanya dalam ujian akademis, tetapi juga ketika berhadapan langsung dengan konten politik yang provokatif di ruang digital.

Literasi Digital sebagai Instrumen Menghadapi Disinformasi

Ancaman disinformasi dan hoaks yang semakin masif di ruang digital tidak dapat diatasi semata melalui regulasi platform atau pendekatan teknis, melainkan membutuhkan individu yang memiliki kapasitas literasi digital yang kuat sebagai benteng pertahanan pertama. Nisa (2024) menegaskan bahwa literasi digital merupakan instrumen utama dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di era digital, mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Kemampuan ini tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus dikembangkan secara sistematis melalui proses pendidikan yang terstruktur dan PKn memiliki posisi strategis untuk menjadi wadah pengembangannya (Kale et al., 2025; Alhudawi & Sitepu, 2025).

Kale et al. (2025) menunjukkan bahwa PKn yang mengintegrasikan literasi digital ke dalam kerangka nilai kewarganegaraan secara efektif menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu-isu demokrasi, HAM, dan dinamika global. Pendekatan ini melampaui literasi digital yang bersifat teknis semata yang mana mahasiswa tidak hanya diajarkan cara memverifikasi informasi, tetapi juga dibekali pemahaman tentang *mengapa* verifikasi itu penting secara etis dan demokratis. Perbedaan inilah yang menjadikan PKn lebih dari sekadar mata kuliah keterampilan digital, yakni ia membentuk *digital citizen* yang sadar nilai, kritis, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan informasionalnya di ruang publik (Afriadi & Fitri, 2024).

Alhudawi & Sitepu (2025) memperkuat perspektif ini dengan menemukan bahwa PKn secara nyata menguatkan etika digital mahasiswa dalam menghadapi banjir informasi di media sosial. Mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran PKn yang berkualitas cenderung lebih mampu membedakan antara informasi yang valid dan konten yang menyesatkan, serta lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi kepada jaringan sosial mereka. Kemampuan ini sangat krusial mengingat bahwa penyebaran hoaks di Indonesia sebagian besar justru dilakukan oleh pengguna yang tidak menyadari bahwa konten yang mereka bagikan mengandung informasi keliru (Nisa, 2024). PKn dengan demikian tidak hanya membentuk mahasiswa sebagai konsumen informasi yang kritis, tetapi juga sebagai produsen dan distributor informasi yang bertanggung jawab.

Afriadi & Fitri (2024) menambahkan dimensi partisipatif dalam kerangka ini dengan menunjukkan bahwa literasi digital yang dikembangkan melalui PKn mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dan konstruktif dalam kehidupan demokrasi digital. Mahasiswa yang melek digital secara kritis tidak sekadar menghindari disinformasi, tetapi juga aktif berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, misalnya melalui klarifikasi hoaks, edukasi sebaya, atau partisipasi dalam diskursus politik yang berbasis fakta.

Kemampuan berpartisipasi secara konstruktif inilah yang menjadi pembeda antara warga digital yang pasif dengan warga digital yang *justice-oriented* sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Westheimer & Kahne (2004). PKn bukan hanya instrumen defensif menghadapi disinformasi, melainkan instrumen transformatif yang memberdayakan mahasiswa sebagai agen perubahan di ruang digital.

Kesenjangan Implementasi dan Urgensi Rekonseptualisasi Pembelajaran PKn

Sekalipun peran PKn dalam membentuk etika digital dan sikap kritis mahasiswa telah diakui secara luas oleh berbagai literatur, kajian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan struktural yang tidak dapat diabaikan, yakni pengetahuan normatif yang diperoleh mahasiswa melalui pembelajaran PKn belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku digital mereka sehari-hari. Supandria et al. (2025) mengungkapkan bahwa mahasiswa pada umumnya memiliki pengetahuan teoretis yang memadai tentang hak dan kewajiban digital, namun masih menunjukkan kelemahan nyata dalam penerapan praktisnya di platform media sosial. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan kurikuler, melainkan mencerminkan kegagalan model pembelajaran PKn yang selama ini bersifat transmisif dan deduktif dalam menjangkau dimensi perilaku nyata mahasiswa di ruang digital.

Hasan (2024) melalui studi kasusnya memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa di media sosial belum secara otomatis diikuti oleh kemampuan berpikir kritis yang memadai. Fakta bahwa intensitas penggunaan media sosial tidak berkorelasi langsung dengan kualitas evaluasi informasi mengindikasikan bahwa gap yang terjadi bersifat pedagogis terletak pada bagaimana PKn diajarkan, dihayati, dan diinternalisasikan, bukan semata pada apa yang diajarkan. Najicha & Kurniawati (2023) menambahkan bahwa penguatan kesadaran kewarganegaraan di lingkungan kampus memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan ekologis, mencakup tidak hanya ruang kelas formal tetapi juga budaya akademik kampus secara keseluruhan sebagai ekosistem pembelajaran yang kondusif.

Faktor yang memperparah kesenjangan ini adalah minimnya inovasi dalam metode pengajaran PKn. Rendahnya keteladanan digital dari para dosen serta kurangnya kreativitas dalam merancang pengalaman belajar yang kontekstual menjadi penghambat utama dalam proses pembentukan kesadaran etis mahasiswa (Supandria et al., 2025). Tarigan et al. (2025) mengingatkan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai daerah turut menciptakan ketimpangan dalam kualitas pengalaman belajar mahasiswa, yang pada akhirnya memengaruhi kapasitas literasi digital mereka secara tidak merata. Kesenjangan infrastruktur ini mempertegas bahwa upaya penguatan PKn berbasis literasi digital tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses teknologi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, Lazuardy et al. (2025) menyimpulkan bahwa inovasi pembelajaran PKn yang adaptif terhadap dinamika digital tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga membekali mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi digital. Rekonseptualisasi ini menuntut pergeseran paradigma dari model pembelajaran yang bersifat transmisif menuju model yang transformatif, di mana mahasiswa tidak sekadar menerima nilai-nilai secara pasif, tetapi secara aktif mengkonstruksi pemahaman mereka melalui pengalaman belajar yang autentik, berbasis kasus nyata, dan reflektif. Afriadi & Fitri (2024) menegaskan bahwa PKn yang mampu merespons dinamika digital secara adaptif akan

menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkompetensi dan berkarakter sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab.

Rekonseptualisasi pembelajaran PKn karenanya tidak dapat berhenti pada tataran wacana akademis semata. Diperlukan langkah-langkah konkret yang mencakup tiga dimensi sekaligus: pertama, pembaruan kurikulum PKn yang mengintegrasikan literasi digital, etika bermedia, dan analisis kritis informasi politik sebagai kompetensi inti; kedua, pengembangan kapasitas dosen PKn sebagai model keteladanan digital yang konsisten; dan ketiga, dukungan kebijakan pemerataan infrastruktur teknologi pendidikan agar seluruh mahasiswa Indonesia memiliki akses yang setara terhadap pengalaman belajar PKn yang berkualitas (Supandria et al., 2025; Tarigan et al., 2025; Lazuardy et al., 2025). Mubaraq & Faslah (2025) menegaskan bahwa semakin tinggi kemampuan berpikir kritis mahasiswa, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik sebagai warga negara yang bertanggung jawab, di mana sebuah kondisi ideal yang hanya dapat terwujud apabila PKn berhasil menutup kesenjangan antara pengetahuan normatif dan praktik digital nyata mahasiswa.

KESIMPULAN

Kajian literatur naratif ini menegaskan bahwa PKn terbukti berkontribusi nyata dalam membentuk sikap kritis mahasiswa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas literasi digital mahasiswa. Rekonseptualisasi pembelajaran PKn yang lebih inovatif, adaptif, dan kontekstual terhadap dinamika digital menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, pertama, penelusuran literatur hanya memanfaatkan satu basis data yaitu *Google Scholar*, sehingga artikel-artikel relevan dari basis data bereputasi lain seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *ERIC* kemungkinan tidak terjangkau. Kedua, dari 14 artikel yang dianalisis, sebagian besar merupakan studi literatur dan kajian konseptual, sehingga bukti empiris yang secara langsung mengukur pengaruh PKn terhadap perubahan perilaku digital mahasiswa masih terbatas. Ketiga, kajian ini tidak mencakup analisis komparatif antarlembaga, antarwilayah, maupun antarnegara, sehingga variasi konteks sosial-budaya dan infrastruktur teknologi pendidikan belum terekam secara memadai. Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa agenda penelitian lanjutan direkomendasikan. Pertama, penelitian empiris berskala besar dengan desain survei yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia perlu dilakukan untuk mengukur secara terukur dampak pembelajaran PKn terhadap kapasitas literasi digital dan sikap kritis mahasiswa. Kedua, penelitian eksperimental yang menguji efektivitas model pembelajaran PKn inovatif, seperti *problem-based learning*, simulasi kasus digital, atau diskusi berbasis isu aktual yang sangat direkomendasikan untuk menghasilkan bukti kausalitas yang lebih kuat. Ketiga, penelitian komparatif antarlembaga dan antarwilayah diperlukan untuk memahami pengaruh konteks sosial-budaya dan kesenjangan infrastruktur teknologi terhadap efektivitas pembelajaran PKn. Keempat, kajian longitudinal yang melacak perkembangan sikap kritis dan perilaku digital mahasiswa sepanjang masa studi akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak jangka panjang PKn. Secara kebijakan, transformasi kurikulum PKn yang didukung pemerataan infrastruktur teknologi pendidikan menjadi agenda mendesak yang memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi Indonesia.

REFERENSI

- Afriadi, B., & Fitri. (2024). The role of citizenship education in shaping awareness of democracy and political participation in the digital era. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 2918–2924. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.1039>
- Alhudawi, U., & Egiana Br. Sitepu. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menguatkan etika digital siswa. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.37755/jspk.v14i1.1712>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik penduduk Indonesia tahun 2020*. BPS.
- Cynthia, R. E., & Sihotang, H. (2023). Melangkah bersama di era digital: Pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31712–31723. <https://jptam.org/index.php/jptam/index>.
- Fanshoby, M., & Prasetyawan, W. (2021). Kapasitas terbatas dalam mengenali hoaks di media sosial pada kalangan mahasiswa UIN Jakarta. *Virtu: Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya Dan Islam*, 1(2), 138–153.
- Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: Tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala*, 19(1), 67–86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>
- Greenhalgh, T., Thorne, S., & Malterud, K. (2018). Time to challenge the spurious hierarchy of systematic over narrative reviews? *European Journal of Clinical Investigation*, 48(6), e12931. <https://doi.org/10.1111/eci.12931>
- Harahap, S., Paturochman, I. R., & Lubis, M. (2023). Menanamkan kritisisme konstruktif di perguruan tinggi: Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengelola tren kontroversial mahasiswa. *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1), 173–181. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v8i1.3440>
- Hasan, R. (2024). Analisis peran media sosial dalam membentuk sikap kritis mahasiswa terhadap isu kewarganegaraan (studi kasus pada Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat). *Media Manajemen Pendidikan*, 7(2), 2622–3694. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.30738/mmp.v7i2.18474>
- Japar, M., Casmana, A. R., Adha, M. M., & Fadhillah, D. N. (2024). Students' perspectives on civic education through digital citizenship in the virtual era. *European Journal of Educational Research*, 13(1), 89–102. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.13.1.89>
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison*. Qualifications and Curriculum Authority.
- Kale, D. Y. A., Mas'ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh di era digital. *Media Sains*, 25(1), 9–14. <https://doi.org/10.69869/54ce0473>
- Kurniawati, A., & Najicha, U. F. (2023). Pentingnya peningkatan kesadaran kewarganegaraan pada mahasiswa di lingkungan kampus. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 98–109. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>
- Lazuardy, D. A., Sukmana, A., & Japar, M. (2025). Inovasi pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (ppkn) untuk menghadapi tantangan era digital. *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 37(1), 32–40. <https://doi.org/10.21009/parameter.371.03>
- Mafindo. (2024, 2 Februari). Siaran pers: Hoaks politik meningkat tajam jelang Pemilu 2024, ganggu demokrasi Indonesia. *Masyarakat Antifitnah Indonesia*.

- Mubaraq, R., & Faslah, R. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai mengembangkan pemikiran politik mahasiswa. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5), 747–752.
- Najicha, F. U., & Kurniawati, A. (2023). Pentingnya peningkatan kesadaran kewarganegaraan pada mahasiswa di lingkungan kampus. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 98-109. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>
- Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Ross Arguedas, A., & Nielsen, R. K. (2024). *Reuters Institute digital news report 2024*. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
- Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Journal of Education*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>
- Nurmansyah, C. A., Juwono, M. P., & Khairiyah, N. (2026). Literasi digital dan transformasi kesadaran kewarganegaraan mahasiswa dalam ekosistem demokrasi digital. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6880–6891.
- Rohmatu, H. P., Alex, & Fahlevi, R. (2025). Eksplorasi nilai-nilai etika digital berbasis kearifan lokal sebagai fondasi pengembangan kecerdasan buatan etis di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(2), 37–44. <https://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v15i2.25042>
- Supandria, Ulfah, A., Firmasnyah, I., Nuraeni, S., & Kius, F. S. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menguatkan etika digital dan kesadaran sosial mahasiswa di era media sosial. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(2), 50–56. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i2.3228>
- Tarigan, P. S., Ginting, M. U. B., & Siregar, D. V. M. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa di era digital: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1610-1616. <https://doi.org/10.69869/54ce0473>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). *Supplementary materials for the spread of true and false news online*. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policy making* (Report No. DGI(2017)09). Council of Europe.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269.
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem pendidikan nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15–36.
- Zuhriyah, A., & Basith, A. (2023). Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Moral Mahasiswa di Era Modern. *Journal of Innovative and Creativity*, 3(3), 99–106. <https://doi.org/10.31004/joecy.v3i3.651>